



SALINAN

WALI KOTA BOGOR

Bogor, 2 Juli 2021

Kepada Yth :

- 1. Para Pimpinan Instansi Pemerintah/Swasta/BUMD;**
- 2. Para Pemilik/Pengelola Tempat Usaha/Jasa;**
- 3. Para Pimpinan/Pengurus Tempat Ibadah;**
- 4. Para Pimpinan/Penyelenggara Kegiatan Pendidikan;**
- 5. Seluruh Warga Masyarakat**

di

Kota Bogor

SURAT EDARAN

NOMOR 440/3389-Huk.HAM

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali dan kebijakan nasional lainnya terkait penanganan COVID-19, maka sebagai implementasinya diperlukan pengaturan dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Bogor.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Bogor;
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Melalui Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro Skala RW di Kota Bogor;
12. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-889 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-718 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bogor;

C. Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Kota Bogor yaitu sebagai berikut :

1. **PPKM Darurat** berupa:
 - a. Membatasi tempat/kerja perkantoran yang non esensial dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) termasuk perguruan tinggi/akademi, SMA dan SMP serta tempat pelatihan lainnya;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 - 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada diktum KETIGA poin c.3 dan d;
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
- l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kereta api;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) berlaku untuk kedatangan ke Kota Bogor serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- n. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

2. **PSBMK** berupa :
 - a. Membatasi resepsi pernikahan atau acara sejenis yang berpotensi kerumunan, dengan maksimal kapasitas 30 (tiga puluh) orang dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. Penutupan pedestrian seputar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor pada Sistem Satu Arah (SSA) pada hari Sabtu dan Minggu, atau hari yang ditentukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor;
 - c. Pelaksanaan kegiatan di rumah ibadah tidak diperkenankan;
 - d. Kegiatan restoran/cafe berupa makan/minum hanya untuk layanan pesan-antar/dibawa pulang untuk jam operasional yang diatur sampai pukul 20.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - e. Penutupan sepanjang jalan Suryakencana pada hari Sabtu dan Minggu, pada pukul 20.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB, kecuali warga setempat atau pemindahan barang untuk pasar atau kegiatan lain yang mendapat ijin dari Satgas COVID-19 Kota Bogor; dan
 - o. Penyekatan beberapa ruas jalan protokol yang bersifat situasional berdasarkan analisa padatnya mobilitas orang dan kendaraan, dengan kebijakan ganjil genap yang diatur oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor.

3. **PPKM Berbasis Mikro** melaksanakan pengawasan secara ketat pada RW atau RT yang masuk dalam kategori Zonasi pengendalian wilayah, melalui pembatasan kegiatan keluar masuk orang dengan *identifikasi melalui Testing, Tracing dan Treatment* selama 7 (tujuh) hari terakhir, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan konfirmasi positif.

D. Penerapan Protokol Kesehatan

Penerapan Protokol Kesehatan 5M tetap dilaksanakan untuk pengendalian Pandemi COVID-19 sebagai berikut :

- a. Menggunakan masker yang baik, benar dan jenis yang konsisten;
- b. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. Menjaga jarak dalam berinteraksi (*physical distancing*);
- d. Menghindari kerumunan dan interaksi; dan
- e. Membatasi mobilitas orang dan barang.

E. Penerapan Protokol Pengendalian

Penerapan Protokol Kesehatan 3T tetap dilaksanakan untuk pengendalian Pandemi COVID-19 sebagai berikut :

- a. *Testing* adalah meliputi pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari seseorang yang memiliki gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) untuk mengkonfirmasi adanya kasus positif COVID-19.

- b. *Tracking* adalah pelacakan kontak erat (*Contact tracing*) adalah rangkaian kegiatan untuk memutus rantai penularan. Elemen utama pada implementasi pelacakan kontak adalah pelibatan dan dukungan masyarakat, perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan situasi wilayah, masyarakat dan budaya, dukungan logistik, pelatihan dan supervisi, serta sistem manajemen data pelacakan kontak.
- c. *Treatment* adalah meliputi kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi klinis.

F. Optimalisasi Posko Penanganan COVID-19

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penanganan COVID-19 di Kota Bogor dilakukan dengan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19, sebagai berikut :

- a. Posko Tingkat Kelurahan, terdiri atas Lurah, Babinsa, Bhabinkantibmas, Satpol PP, Satlinmas, Tim Penggerak PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tenaga Kesehatan, pemangku kepentingan terkait dan relawan lainnya dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pencegahan, sebagai sosialisasi penerapan protokol kesehatan;
 - 2) Penanganan, untuk melaksanakan bidang kesehatan (*testing, tracking dan treatment*), vaksinasi dan karantina, untuk bidang ekonomi dan bidang sosial;
 - 3) Pembinaan, untuk melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan dan pemberian sanksi; dan
 - 4) Pendukung, untuk memperkuat pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan, dalam melaksanakan pendataan, logistik (beras, masker, dsb), komunikasi dan administrasi.
- b. Posko Tingkat RW, yang terdiri atas Pengurus RW Siaga COVID-19 yang melibatkan setiap RT, Polisi RW Siaga, ASN Kota Bogor, Tim Penggerak PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, pemangku kepentingan terkait dan relawan lainnya dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Pengawasan;
 - 2) Logistik;
 - 3) Pelayanan kesehatan;
 - 4) Transportasi;
 - 5) Kebersihan;
 - 6) Perlengkapan;
 - 7) Administrasi posko
 - 8) Komunikasi, sosialisasi dan keagamaan; dan
 - 9) Pemulihan ekonomi dan sosial.
- c. Posko Tingkat Kecamatan, terdiri atas Camat, Kapolsek, Danramil, Satlinmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tenaga Kesehatan, Penggerak PKK, pemangku kepentingan terkait dan relawan lainnya melaksanakan pelaporan dan supervisi Posko Penanganan COVID-19 pada tingkat Kelurahan dan RW, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor.

- d. Posko *check point* disiapkan untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang dan disiapkan oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor melalui kebijakan Kewaspadaan Pemudik dan Pendetang di Kota Bogor, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat pada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas propinsi dan/atau zona aglomerasi.
- e. Dilakukan *treatment* terhadap wilayah tingkat RW yang diketahui 2/3 dari seluruh jumlah RT masuk dalam zona merah, maka dilakukan kebijakan protokol pengendalian karantina area terbatas di tiap rumah, dengan waktu monitoring selama 7 (tujuh) hari dengan kriteria:
 1. Rumah Zona Hijau artinya 3 rumah bersebelahan dari rumah terpapar kasus Covid-19;
 2. Rumah Zona Kuning artinya 2 rumah bersebelahan dari rumah terpapar kasus Covid-19;
 3. Rumah Zona Oranye artinya 1 rumah bersebelahan dari rumah terpapar kasus Covid-19 dan/atau dalam rumah terdapat anggota keluarga yang kontak erat dengan kasus positif; dan
 4. Rumah Zona Merah artinya terdapat pasien positif Covid-19;

G. Penerapan Kebijakan Kewaspadaan Pemudik dan Pendetang

Penerapan kebijakan Kewaspadaan Pemudik dan Pendetang Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi COVID-19 Di Kota Bogor, khususnya pada hari libur/libur nasional melalui Satuan Tugas Khusus (Satgasus) KP2 Kota Bogor, melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Sub Satgasus penghadangan, melaksanakan tugas berupa penyekatan secara statis di perbatasan, *check point* pada terminal, stasiun atau travel perjalanan serta kendaraan angkutan lainnya;
- b. Sub Satgasus deteksi, melaksanakan tugas berupa pendataan pemudik dan pendatang;
- c. Sub Satgasus penindakan, melaksanakan tugas berupa pemeriksaan hasil uji lab terhadap COVID-19 (rapid test, pcr, swab, genose), pemberian sanksi pelanggaran protokol kesehatan dan melakukan evakuasi berupa isolasi (rumah sakit, mandiri atau tempat lain yang ditentukan);
- d. Sub Satgasus administrasi, melaksanakan tugas berupa evaluasi harian terhadap pemudik dan pendatang, serta memberikan rekomendasi surat ijin keluar masuk (SIKM); dan
- e. Sub Satgasus dukungan, melaksanakan tugas berupa pemberian bantuan (asistensi) terhadap posko ditingkat Kelurahan, RW atau RT, evaluasi terhadap posko kewaspadaan disetiap tingkatan, dan rekomendasi pelaksanaan kewaspadaan serta monitoring terhadap wilayah mikro dan komunitas termasuk hotel, apartemen, penginapan, rumah kontrakan dan kos serta tempat lainnya.

H. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum kebijakan PPKM Darurat di Kota Bogor melibatkan Aparatur Sipil Negara, Kepolisian, Tentara Nasional, Kejaksaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas COVID-19 Kota Bogor, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi **Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri)**.

I. Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan Penanganan COVID-19 di Kota Bogor, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor atau anggaran masing-masing yang tersedia pada setiap unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan.

J. Jangka Waktu Pemberlakuan

Surat Edaran ini mulai diberlakukan sejak tanggal **3 Juli 2021** sampai dengan tanggal **20 Juli 2021**, dan sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan perkembangan terkini.

K. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini diberlakukan, maka Surat Edaran Wali Kota Bogor Nomor 440/3212-Huk.HAM tanggal 21 Juni 2021 tentang Perpanjangan Kesepuluh Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Tingkat Kelurahan Dalam Rangka Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

WALI KOTA BOGOR

SELAKU

**KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19 KOTA BOGOR**

Ttd

Dr. BIMA ARYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)
BOGOR BINA NIP. 19800507 200312 1003